

PERISTIWA DONGGO 1972 DI BIMA DALAM MELAWAN REZIM ORDE BARU

1972 DONGGO EVENT IN BIMA IN THE FIGHT AGAINST THE NEW ORDER REGIME

Aksa

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
Jln. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa
Email: aksa131288@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 7 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Paper ini menjelaskan tentang gerakan sosial masyarakat yang terjadi di Bima dalam melawan rezim Orde Baru. Aksi Massa di Bima yang dimotori oleh elit masyarakat Donggo lebih dikenal dengan istilah 'Peristiwa Donggo 1972'. Sebagai sebuah gerakan sosial masyarakat di tingkat lokal, *Dou Donggo* mampu bersatu membangun kekuatan massa yang didasari oleh kekuatan solidaritas etnik. Peristiwa ini dilatari oleh kebijakan dan tindakan Soeharmadji (Bupati Bima) yang dinilainya diskriminatif dan cenderung mengabaikan pembangunan di wilayah Donggo. Selain itu, Soeharmadji selalu bertindak otoriter dan militeristik, tidak sedikit masyarakat Donggo menjadi korban keganasan rezimnya. Tindakan diskriminatif rezim dan rasa kekecewaan masyarakat memicu lahirnya perlawanan dalam bentuk gerakan massa. Menariknya aksi massa ini dimotori oleh tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, tokoh spiritual dan tokoh politisi muda. Kolaborasi elit-elit lokal menjadi spirit tersendiri bagi perlawanan masyarakat atas rezim Orde Baru di Bima pada tanggal 22 Juni 1972. Pasca aksi massa, aparat keamanan meresponnya dengan tindakan yang represif, tokoh-tokoh yang menjadi aktor gerakan sosial ditangkap, disiksa, dan dipenjara demi mengakhiri semangat perlawanan *Dou Donggo*. Peristiwa ini menjadi bagian catatan kelam dari beberapa rentetan peristiwa sejarah represifitas rezim Orde Baru. Tulisan ini bertujuan menjelaskan sisi kemengapaan 'Peristiwa Donggo 1972' itu terjadi mulai dari latar belakang dan terjadinya peristiwa serta dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan yaitu metode penulisan sejarah yang melalui empat tahapan: heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Metode penulisan berguna untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang utuh.

kata kunci: peristiwa donggo, gerakan sosial, bima, orde baru.

Abstract

This paper explains the social movements of the society that occurred in Bima against the New Order regime. The Mass Action in Bima, which was initiated by the elite community of Donggo, is well-known as the '1972 Donggo Event'. As a social movement at the local level, Dou Donggo was able to unite to build mass forces based on the strength of ethnic solidarity. This event was based on the policies and actions of Soeharmadji (Regent of Bima), which was discriminative and tended to ignore development in the Donggo region. Besides that, Soeharmadji always acted authoritarian and militaristic, many people of Donggo became victims of his vicious regime. The regime's discriminative actions and the community disappointment triggered the resistance in the form of mass movements. Interestingly, this mass action was initiated by intellectuals, religious figures, tradition figures, spiritual figures, and young politicians. The collaboration of local elites became an obvious spirit for community resistance to the New Order regime in Bima on June 22, 1972. After mass action, security forces responded with repressive actions, figures who became social movement actors were arrested, tortured, and imprisoned in order to end the spirit of resistance of Dou Donggo. This event became a dark part of a series of historical events in the repressive New Order regime. This paper

aims to explain why '1972 Donggo Events' occurred, from the background and the occurrence of the events to the effects it caused. The method used is the method of historical writing which goes through four stages: heuristics, source criticism (verification), interpretation and historiography. Writing methods are useful for reconstructing the past systematically and objectively by collecting data, evaluating and synthesizing evidence to determine facts and reach complete conclusions.

keywords: *donggo events, social movement, bima, new order.*

PENDAHULUAN

Naiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 setelah menggantikan Soekarno, dinilai akan memberi harapan bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan Indonesia di bawah kendali Orde Baru atau dalam istilah politik dikenal sebagai rezim Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu periode penting dalam pembangunan, perekonomian dan perpolitikan Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh orientasi dan dukungan pemerintah yang begitu kental dengan kepentingan Negara-negara di blok Barat dan Timur. Kuatnya pengaruh Negara-negara blok Timur, determinisme paham sosialisme lebih kuat ketimbang modernisme di Era Orde Lama, sebaliknya pada Era Orde Baru, akar-akar sosialisme bahkan tercerabut, dan *mainstream* pemikiran, gaya hidup maupun paradigm pembangunan sepenuhnya berkiblat pada modernisme dan pemikiran-pemikiran sekuler yang pragmatis (Liddle, 1992: 82).

Dengan berbagai kebijakan, Orde Baru telah menjadikan isu pembangunan dan stabilitas sebagai isu utama pemerintahannya, akibatnya segala cara dilakukan demi terwujudkan harapan dan cita-cita Orde Baru. Dengan dalil pembangunan, Orde Baru berusaha memperbaiki tatanan sosial, budaya, politik, hukum dan keamanan yang diwariskan oleh rezim Orde Lama. Kebijakan utama yang ditempuh pemerintahan Orde Baru adalah melakukan restrukturisasi ekonomi dengan berbagai kebijakan yang menekankan faktor pertumbuhan. Tetapi kebijakan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan mengikuti pola-pola ekonomi internasional tentang investasi, mengimplementasikan stabilitas politik demi terjaminnya investor asing. Pemerintah Orde Baru mengambil sejumlah kebijakan politik yang berorientasi stabilitas dan keamanan

nasional. Undang-Undang Anti Subversif warisan kolonial tetap diaktifkan, dan diadakannya fusi partai yang membawa dampak buruh dalam proses demokratisasi di Indonesia (Hasan, 1987: 7-8).

Menurut Anderson terdapat tiga garis kebijaksanaan Orde Baru yang sangat menarik. *Pertama*, perumusan ideologi negara menangani masa depan politik Indonesia, *Kedua*, cara-cara negara menangani “orang Tionghoa”: baik yang WNI maupun yang asing dan *Ketiga*, kaitan negara dengan landasan “kelas sosial”nya. Oleh Nordlinger Orde Baru tergolong dalam “tipe penguasa Pretorian”: tipe ini merupakan kategori kecil yang tersendiri (diduga tidak lebih dari 10%), sebab, kebanyakan rezim yang didominasi militer, menampilkan janji-janji yang demikian (Nordlinger, 1977: 26). Aspek lain yang menandai menguatnya superioritas Orde Baru adalah menguatnya peran ABRI, bahkan sampai pada tingkat tertentu telah mendominasi aspek-aspek kehidupan sosial yang paling vital (Jenkins, 1984: 13). Karena doktrin Dwifungsi ABRI, tugas awalnya hanya terbatas sebagai alat Negara telah menjadi begitu dominan dalam berbagai posisi pemerintahan dan kebijakan (Shambazy, 1990: 62-73). Dengan kata lain, doktrin Dwi Fungsi ABRI telah melimpahkan tanggung jawab kenegaraan militer yang sifatnya permanen dalam bidang keamanan nasional dan pembangunan sosial-ekonomi, dan politik dalam negara.

Rezim Orde Baru telah memanfaatkan demokrasi Pancasila sebagai alat memonopoli kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang bersifat otokrasi. Soeharto Membatasi orang-orang di luar lingkaran barisan pendukung dan mempraktekan sistem nepotisme dengan memasang kroni-kroninya menempati posisi strategi di pemerintahan. Praktek monopoli kekuasaan ditunjukkan juga sampai ke

masalah Ideologi, dengan Pancasila sebagai Ideologi tunggal (semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi mahasiswa mewajibkan Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas berorganisasi). Selama kekuasaan rezim Orde Baru, Soeharto menunjukkan sikap represif dengan melakukan tindakan kekerasan dan pembungkaman aspirasi politik teradap lawan politiknya. Karenanya menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Indonesia (Crouch, 1986:98).

Pola distribusi kekuasaan seperti itu memperlihatkan Presiden memusatkan kekuasaan, baik pada level infrastruktur maupun superstruktur politik. Secara superstruktur, sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, yang berperan sebagai mesin politik pengumpul suara (legitimasi), Presiden menguasai secara langsung hegemoni Golkar atas partai politik. Hal ini juga berpengaruh pada fungsi kontrol legislatif di DPR. Akibatnya, kekuasaannya sebagai kepala eksekutif tidak mendapat kontrol dari legislatif (Fattah, 1998:86).

Sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru, pemerintah pusat mengirim Soeharmadji, seorang anggota militer berpangkat Letnan Kolonel menjadi Bupati di Bima periode (1967-1974). Sejak awal memimpin Kabupaten Bima, Soeharmadji sebagaimana rezim Orde baru di tingkat lokal lainnya, menjalankan sistem politik secara hegemonik-militeristik. Soeharmadji mengandalkan Golkar menjadi kekuatan mayoritas tunggal (*single majority*) yang dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan militer (ABRI), dan birokrat (PNS) sebagai poros utama dalam mengendalikan roda pemerintahannya. Gerakan sosial di Bima tahun 1972, merupakan ekspresi kekecewaan *Dou Donggo* dari berbagai perlakuan diskriminatif pemerintah. Karena itu, *Dou Donggo* ‘menggugat’ Bupati Bima dengan menggerakkan massa menuntut keadilan dan meminta Soeharmadji (Bupati Bima saat itu) turun dari jabatannya serta angkat kaki dari Bumi Mbojo. Tulisan ini menjelaskan sisi kemengapaan ‘Peristiwa Donggo 1972’ itu terjadi mulai dari latar belakang dan terjadinya

peristiwa serta dampak yang dialami oleh Dou Donggo setelah peristiwa Donggo 1972. Tulisan ini bertujuan menjelaskan sisi kemengapaan ‘Peristiwa Donggo 1972’ itu terjadi mulai dari latar belakang dan terjadinya peristiwa serta dampak akibat adanya gejolak sosial di Bima yang dimotori oleh Dou Donggo.

TINJAUAN PUSTAKA

Karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam mengungkapkan peristiwa yang terjadi di Bima tahun 1972 adalah karya-karya yang relevan dengan yang ditulis dalam buku ini. Beberapa karya yang menyorot secara spesifik tentang peristiwa Donggo telah di tulis oleh Mustahid H. Kako tahun 2013 berjudul “Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan, dan Hukuman Semasa Orde Baru”. Tulisan lebih fokus pada peristiwa penangkapan, dan penyiksaan serta hukuman yang di layangkan kepada tokoh-tokoh lokal yang menjadi aktor aksi massa. Karya H. Mustahid H. Kako jika dikaitkan dalam karakteristik ilmu sejarah, dapat dikategorikan sebagai karya sejarah serba subjektif. Pembahasan dalam bukunya memperlihatkan unsur subjektifnya melekat sebagai orang dalam. Selain H. Mustahid sebagai orang Donggo asli, dia juga merupakan putera H. Kako, salah seorang beberapa tokoh penggerak dalam menggerakkan dan memobilisasi masa dalam Peristiwa Donggo. Subjektifitas dalam penulisan sejarah bukan berarti sesuatu yang kaku sehingga harus ditiadakan, subjektifitas selalu muncul dalam setiap penulisan sejarah termasuk penulisan buku ini. Hal terpenting adalah melihat bagaimana dan sejauh mana cara seorang meramu dan meracik karya sejarahnya dengan meminimalisir unsur-unsur subjektivitas baik unsur Suku, Agama, Ras, maupun golongan/komunitas yang melekat dalam dirinya. Terlepas dari itu tulisan H. Mustahid H. Kako telah memberikan sumbangsih lebih bagi masyarakat dan daerahnya terutama bagi sejarawan lokal dalam melanjutkan kajian-kajian kesejarahannya.

Sedangkan karya ilmiah yang bersifat akademik telah ditulis Ridha R. Rangga tahun 2011 yang berjudul “Gerakan Sosial Masyarakat Donggo Tahun 1972: Kisah Elit-Elit Terkalahkan”. Tulisan ini sebagai salah satu prasyarat akademik untuk menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) di Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang. Pembahasan yang terdapat dalam tulisan Rangga, lebih banyak menguraikan peran serta tokoh-tokoh dalam menggerakkan dan memobilisasi massa. Kehadiran elit-elit tersebut menunjukkan sikap perlawanan yang serius kepada rezim Soerharmadji (Bupati Bima). Meskipun demikian, perlawanan mereka berakhir dengan penangkapan dan penyiksaan serta hukuman penjara bagi aktor-aktor dibalik gerakan sosial di Bima tahun 1972. Inilah yang ditulis oleh Rangga seputar Gerakan sosial masyarakat Donggo tahun 1972 sebagai sebuah ‘Kisah Elit-Elit yang Terkalahkan’.

Tulisan tentang peristiwa Donggo secara umum, belum ada yang mengungkapkan secara mendalam, yang mencoba memahami dan mengkaji sejarah di tingkat lokal ini dengan pendekatan ilmu sosial humaniora sehingga menghasilkan karya sejarah yang multidimensional. Lebih dari itu, belum ada yang mencoba menangkap pesan-pesan moral, nilai-nilai kearifan dan kubernamanan dari peristiwa sejarah tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan itu secara akademis, berbasis fakta dan data, dalam kerangka kebenaran ilmiah agar bisa diterima oleh rasio (*reason*).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan mengikuti metode ilmu sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. *Heuristik* yaitu pengumpulan data/ sumber melalui kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi. *Kritik Sumber* dilakukan untuk memverifikasi terkait autentisitas, kredibilitas dan validitas data-data sejarah. *Interpretasi* untuk menganalisis dan menyintesis data yang tersaring melalui kritik sumber dengan ketelitian, kecermatan dan sikap menghindari subjektivitas terhadap fakta sejarah serta mengimajinasikan kata-kata

dengan tetap mengacu pada sumber-sumber ada. *Historiografi* atau penulisan sejarah, Karya sejarah yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga menghasilkan makna dari peristiwa itu sendiri berdasarkan analisis historis.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Peristiwa Donggo 1972 di Bima

Operasi Koter 1971 di Bima

Menjelang Pemilu 1971, Orde Baru berkehendak melakukan sebuah tindakan ‘penyeragaman’ secara paksa dengan cara membangun opini tentang keberhasilan pembangunan dan memobilisasi massa untuk mendukung semua kebijakan dan agenda politiknya. Dalam Laporan Shin (1989) oleh Karim, bahwa terbentuknya negara Orde Baru dengan menggunakan pendekatan ekonomi politiknya dilakukan dengan cara ‘demobilisasi’ dan ‘depolitisasi’, intimidasi rakyat dan pembersihan birokrasi dari pengaruh luar, terutama partai politik dan kelompok agama (Karim, 1999: 62). Gaya pemerintahan semacam ini dibangun dengan model pemerintahan yang bersifat paternalistik, namun juga menindas. Orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, tetapi hanya lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat (Ricklefs, 2008: 58).

Rezim Orde Baru di Bima dikendalikan oleh Soeharmadji sebagai titipan pemerintah pusat untuk menjadi Bupati Bima periode (1967-1974), Soeharmadji merupakan anggota militer berpangkat Letkol mengimplementasikan sistem politik di Bima dengan membangun tembok kekuasaan dan mendesain Golkar menjadi mayoritas tunggal (*single majority*). Eksisnya partai Golkar di Bima sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan militer, sedangkan pejabat pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil sebagai poros utama dalam menjalankan pemerintahannya.

Suatu fakta yang terjadi yaitu pergolakan politik menjelang Pemilu 1971, Golkar dengan kekuatan militer melakukan Operasi Koter (Komando Teritorial) di Bima termasuk daerah Donggo. Demi

mengeksek kemenangan Golkar, militer mengerahkan kekuatan semua personil turun tangan demi tegaknya pohon beringin di *Dana Donggo*. ABRI mendatangi kaum intelektual, ulama, politisi dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dengan melakukan negosiasi dengan mereka agar mau bergabung dengan Golkar. Suatu strategi yang digunakan untuk mendapat dukungan sampai ke pedalaman masyarakat. Hegemoni kekuasaan dan desain peta perpolitikan semacam ini juga terdapat dalam doktrin setengah resmi "*Floating Mass*" (Massa Mengambang, yang telah dikumandangkan pada 1971), yang pada efeknya menandakan, bahwa partai-partai politik tidak boleh mengalihkan perhatian massa pedalaman yang masih bodoh, dari tugas-tugas pembangunan, kecuali pada masa kampanye pemilu yang singkat dan ditetapkan oleh Negara.

Usaha kuning isasi di Kecamatan Donggo tidak berjalan mulus sebagaimana yang terjadi di kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bima. Dou Donggo melalui tokoh-tokoh politik lokalnya dengan tegas menyatakan tidak mau dengan Golkar, tentu saja sikap politik beberapa tokoh yang cukup berpengaruh di Dana Donggo mengundang kemarahan rezim Soehardjati di Bima. Akibatnya ABRI melakukan intervensi, intimidasi bahkan penyiksaan terhadap masyarakat yang tidak berdosa lantaran tidak memilih Golkar. Keberanian menyatakan tidak atau jangan memilih Golkar seperti yang dilakukan oleh Abdul Madjid Bakry adalah suatu sikap menentang pemerintah Orde Baru yang telah mengabaikan pembangunan di wilayah Kecamatan Donggo.

Keberanian dan sikap keras kepala tokoh-tokoh Donggo untuk tidak bergabung dengan Golkar menjadi perhatian serius ABRI di Bima. ABRI sebagai pihak keamanan berencana mengambil tindakan sepihak dengan membawa tokoh-tokoh Donggo ke Komando Distrik Militer (Kodim) 1608 Bima. Abdul Madjid Bakry sempat di tanah oleh pihak militer di Pasanggrahan Desa OO untuk di bawa ke Kodim 1608 Bima. Namun, usaha ABRI mengalami kegagalan, karena masyarakat Donggo yang telah mengetahui

rencana ABRI bereaksi dengan mengepung Pesanggrahan tempat anggota Kodim menahan tokoh-tokoh Donggo. Masyarakat meminta pihak keamanan melepaskan kembali mereka yang di tahan dengan meneriakkan yel-yel "lepaskan guru kami, lepaskan bapak kami, jangan bawa guru kami, jangan bawa bapak kami" (La Nora, 2008: 85).

Pemilu Berdarah di Desa Bajo Kecamatan Donggo

Pemilu di daerah Kabupaten Bima tahun 1971, adalah bentuk pesta demokrasi yang berjalan secara legalitas formal saja. Bagaimana tidak, pemilu sudah diseting sedemikian rupa, masyarakat tinggal memeriahkan pesta rakyat agar terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, mengingat pemilu merupakan elan vital bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Jauh sebelum pemilihan, Pemerintah pusat sudah menyiapkan beberapa kalangan militer yang siap dikirim untuk memerintah di setiap daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota bahkan ke tingkat Kecamatan.

Kecurangan pemilu di daerah Kabupaten Bima, bukan saja terjadi pada tahun 1971. Kemenangan PPP dalam pemilu 1977 telah mengejutkan pemerintah pusat, sebab disaat kebijakan floating mass diterapkan, Golkar tetap mengalami kekalahan. Resistensi dan keberanian masyarakat Bima melawan dominasi kekuasaan pemerintahan pusat ditegaskan kemudian dengan kekalahan M. Thohir (kandidat utama Bupati Bima dari pemerintah pusat). Dalam pengambilan surat suara di tingkat DPRD Kabupaten Bima, M. Thohir kalah suara dari Drs. Muhidin Aziz. Akhirnya kedua orang tersebut tidak ada yang menjadi Bupati, pemerintah pusat kemudian menunjuk Mayor Umar Haroen sebagai Bupati Bima (Haris, 2010: 67).

Hasil pemilu 1971 telah memenangkan Golongan Karya dengan secara telak mengalahkan partai-partai lain termasuk partai yang berhaluan Islam. Sebagai contoh, PNI sebagai partai yang unggul di pemilu 1955 dengan perolehan suara 22,3%, merosot secara drastis dalam pemilu 1971 dan hanya mampu

meraih 6,9%. Enam tahun kemudian, pada 1977, Suharto memaksakan lagi PNI berfusi dengan dua partai Kristen dan beberapa partai kecil non-Islam, “partai” yang baru hanya merebut 8,6% suara (MacDonald, 1980: 107, 239), dan pada pemilu tahun 1982, hanya mendapat sekitar 8% suara.

Partai-partai yang berbasis Islam dalam pemilu 1971, dibuat tak berdaya oleh Golkar yang dikendalikan oleh militer. Menurut Rusli Karim dalam Jurdi, lemahnya kedudukan umat Islam dalam percaturan awal Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an disebabkan oleh dua faktor: Pertama, persepsi politik yang bersifat ideologis. Elite Islam masih berpengaruh kuat dengan cara pandang yang bersifat ‘simbolik-ideologis-Islam’. Kedua, kelemahan internal umat Islam yang terkait dengan sumber daya yang bersaing dengan kelompok lain, sempitnya wawasan pikiran para pemimpin organisasi Islam, persaingan pengaruh dan tiadanya persatuan diantara partai-partai Islam dan organisasi massa Islam (Jurdi, 2007: 48).

Dua faktor tersebut mendorong penguasa Orde Baru untuk menyingkirkan kekuatan-kekuatan Islam dalam percaturan politik, sebab pemerintah Orde Baru dari sejak lahirnya telah melakukan monopoli pemerintahan dan pengawasan politik secara terpusat, kegiatan-kegiatan kelompok non-pemerintah, diatur secara ketat dan adanya keterlibatan aktif militer dalam urusan-urusan umum (Antlov, 1995: 3).

Usaha pemerintah Orde Baru untuk memasifkan dominasi partai Golkar telah berhasil secara struktur dan sistematis di beberapa daerah. Rezim Orde Baru berhasil menyingkirkan kekuatan Islam dalam percaturan politik dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, termasuk daerah Kabupaten Bima. Pemilu 1971 di Kabupaten Bima didominasi oleh Golkar, sebagian besar suara Golkar di tingkat kecamatan dimenangkan secara telak oleh Golkar dan semuanya berjalan mulus, kecuali di kecamatan Donggo. Rasa kekecewaannya atas Soeharmadji sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru di Bima, membuat *Dou Donggo* tidak telalu memihak dengan kepentingan politik Golkar.

Pemilu di *Donggo* 1971 dimenangkan oleh partai yang berbasis Islam yaitu Partai Muslim Indonesia (Parmusi) yang diketuai oleh Abdul Madji Bakry, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) yang dipimpin oleh Abdulah dan Nahdatul Ulama (NU) yang diketuai oleh H. Rasyid dan Golkar menelan kekalahan di *Dana Donggo*. Sekretaris Bersama Golkar dipermalukan oleh Partai Islam yang tidak didanai dan didukung oleh birokrasi dan ABRI. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bappilu), Sekber Golkar Kecamatan Donggo, maupun Kabupaten Bima dibuat terperangah oleh *Dou Donggo* dalam menyaksikan hasil perhitungan suara pemilu. Sekber Golkar bungkam seribu bahasa. Ini adalah ekspresi dari kebencian masyarakat terhadap konspirasi politik dan kekerasan oleh rezim pemerintahan otoriter Soeharmaji (La Nora, 2008: 25).

Kekalahan Golkar menjadi tamparan yang cukup memalukan dan mengundang kemarahan Pemkab Bima, Kodim dan Koramil Donggo kehilangan muka. Karena itu, Anggota Tripika, Camat, dan Dansek terpaksa turun tangan dengan memanggil seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk datang di Desa Bajo, Pusat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan dan berkumpul di dalam Masjid Raya Desa Bajo. Kedatangan kepala Desa dan perangkatnya di Desa Bajo guna dimintai keterangan dan bertanggungjawab atas kekalahan Golkar di hadapan Ketua PPS Komando Rayon Militer (Koramil). Beberapa kepala Desa yang hadir diantaranya M. Ali Taamin dan Jamaluddin masing-masing sebagai Wakil Kepala Desa OO dan Desa Kala, Kecamatan Donggo.

Pejabat yang ikut mengintervensi termasuk anggota Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan), Abdullah BA (Camat Donggo), Danbuteptra Letnan Amir Hamzah, dan Dansek Aiptu Pol Muchtar Abas. Tidak terima dengan intervensi dan perlakuan kasar dari mereka, M. Ali Taamin dan Jamaluddin membentak mengajak mereka berkelahi secara jantan. Letnan Satu TNI AD Amir Hamzah langsung naik pitam dan melayangkan pukulan secara bertubi-tubi atas mereka. Masjid Bajo menjadi saksi bisu atas kekejamannya, Masjid diinjak langsung oleh tentara tanpa membuka sepatunya, Masjid yang seharusnya tempat

suci umat Islam, telah berubah menjadi kotor oleh cecaran darah segar masyarakat yang tak berdosa.

Pemilu di Desa Bajo 1971 menjadi Tragedi berdarah di Dana Donggo, tragedy ini memicu kemarahan Dou Donggo. Masyarakat Donggo lebih baik mati dari pada harga diri dan martabatnya diinjak-injak. Mendengar M. Ali Ta,amin dan Jamaluddin H. Yasin disiksa oleh oknum ABRI, Masyarakat Donggo bereaksi cepat dengan menyatukan massa dari beberapa Desa menuju Desa Bajo tempat mereka disiksa. Sampai di Bajo, Dou Donggo membabi buta, mengobrak-abrik kotak suara, dan membakar papan nama Golkar serta menghancurkan Kantor Camat Donggo. Sementara Komando Rayon Militer (Koramil), Intel Kodim Bima, serta anak buahnya melarikan diri ke Sila, Kecamatan Donggo dan sebagiannya menyelamatkan diri ke Kota Bima.

Bersatunya Tokoh-Tokoh Lokal di Donggo

Gerakan sosial yang terjadi di Bima tahun 1972 digerakkan oleh gabungan elit-elit lokal yang berpengaruh di Kecamatan Donggo. Tokoh-tokoh penggerak Peristiwa Donggo terdiri dari berbagai kalangan baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, tokoh kebatinan dan mistisisme, tokoh spiritual termasuk tokoh dari kalangan muda. Namun tanpa menafikan peran yang lain terutama peran masyarakat kalangan bawah sebagai kekuatan massa demontran, Eli-Elit yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa tersebut ada lima orang antara lain: Tuan Guru KH. Abdul Madjid Bakry sebagai representasi tokoh Ulama. H. Kako sebagai representasi tokoh kebatinan (tokoh mistisisme lokal).

Abas Oya BA mewakili kaum intelektual muda dan aktivis jebolan Universitas Mustopo (Beragama) Jakarta. Ali Taamin (H. Ale) dan Jamaluddin H. Yasin representasi tokoh politisi lokal (elit-elit Desa yang berpengaruh). Sebelum merancang dan menggerakkan sebuah gerakan sosial yang sempat menggegerkan Bumi Gora dan mendapat sorotan media lokal maupun nasional. Kelima tokoh tersebut mempunyai

karakter kepribadian masing-masing dalam mempengaruhi massa serta kewibawaannya menjadi contoh tersendiri bagi masyarakat Donggo.

Besatunya elit-elit dari Donggo tersebut memberi energi positif bagi masyarakat dalam membangun solidaritas yang kuat, sebuah rasa solidaritas yang sudah lama dibangun atas dasar identitas etnik ke-Donggo-an. Kekuatan solidaritas etnik inilah yang memudahkan kelima tokoh ini memobilisasi massa dari berbagai penjuru di Kecamatan Donggo. H. Abas Oya dengan modalnya sebagai aktivis sejak menjadi mahasiswa di Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta, telah mampu membangkitkan kesadaran Dou Donggo dari diskriminasi rezim Soeharmadji di Bima. Ia menjadi aktor intelektual yang mendesain pergerakan massa.

Selanjutnya M.Ali Ta,amin dan Jamaluddin H. Yasin tampil sebagai garda terdepan dalam memompang semangat massa. M. Ali Taamin dengan sikapnya yang tegas mampu mensugesti massa dalam menentang ketidakadilan, siap membela kebenaran dengan segala konsekuensinya. Sedangkan Jamaluddin H. Yasin menjadi orator dan agitator massa aksi yang handal, kehadirannya memberikan energi tersendiri bagi *Dou Donggo* dalam menggugat rezim diskriminatif.

Begitu pula dengan Abdul Majid Bakry, sebagai seorang ulama muda ia mampu membangkitkan spirit perlawanan massa dengan menegakkan amar makruf nahi mungkar, melawan segala bentuk penghambaan termasuk rezim yang dinilainya menindas *Dou Donggo*.

Dalam konteks ini, Abdul Majid Bakry berusaha menurunkan wacana ketauhidan dalam ranah kehidupan sosial, istilahnya Amien Rais sebagai implementasi tauhid sosial. Adapun H. Kako yang sejak lama sudah dikenal oleh Dou Donggo sebagai sosok yang tegas dan berwibawa karena kekuatan supranaturalnya, tampil sebagai tokoh kebatinan yang mensugestis masyarakat Donggo lewat unsur-unsur tradisional berbasis spritualitas.

Massa Bergerak dalam Aksi Massa “22 Juni 1972”

Aksi Massa yang dilakukan oleh masyarakat Donggo dimulai dengan berjalan kaki dari Desa OO melewati Dusun Mpili dan Kamunti Kecamatan Donggo, menuju Kancoa Rida Kecamatan Bolo, di Kancoa Rida Massa aksi, beristirahat sejenak melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah dan setelah solat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Bima dengan melewati Kecamatan Woha, Kecamatan Palibelo, sampai ke Kantor Bupati yang berpusat di Kota Bima. Masyarakat Donggo yang turun aksi dipimpin langsung oleh Abas Oya BA, Jamaluddin H. Yasin dan M. Ali Ta'amin dengan menempati posisi sebagai gerda terdepan, Tuan Guru Haji Abdul Madjid Bakry membaur di tengah-tengah massa, sedangkan H. Kako Bungko mengawal massa di bagian belakang, dengan sikapnya yang tegas H. Kako selalu mengawal barisan dan massa agar tidak ada satupun yang keluar dari garis komando. Sekitar pukul 16.00 WITA mereka tiba di Dusun Muku Kecamatan Bolo dan berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat Ashar berjamaah. Selesai sholat, massa melanjutkan *long march* melintasi jalan Negara dan baru sampai di Desa Pandai, Kecamatan Woha pukul 18.30 WITA.

Sesampainya massa di Desa Pandai Kecamatan Woha, Pemerintah Kabupaten Bima sudah lebih awal menunggu kedatangan massa dari Donggo. Penghadangan dilakukan oleh Pemda Bima, yang terdiri dari Muspida, anggota DPRD Bima, Kahumas, dan Kasospol. Penghadangan dari unsur Pemda Bima diback-up oleh ratusan personil ABRI/polri yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf.Zainuddin AG, Danki senapan A Batalyon Infanteri 742 Satya Wira Yudha Bima.

Hasil negosiasi antara massa dari Donggo dengan anggota pihak pemerintah Kabupaten Bima di Desa Pandai, Kecamatan Woha melahirkan ‘Kesepakatan Pandai’, yang memuat tiga point penting antara lain; *Pertama*. Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (Kimpraswil) harus memperhatikan infrastruktur (mengaspal jalan darat) sebagai akses jalan menuju Kecamatan Donggo. *Kedua*, Kepala dinas

pertanian berjanji akan memberikan bibit unggul berupa, padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Dinas perkebunan akan memberikan bibit manga, nangka untuk ditanam di sepanjang pesisir pantai mulai dari Lewidewa, Lewintana, Bajo, Sarita, Puntti, Sowa, Sai, sampai Sampungu, dan Dinas peternakan yang sedang dijabat oleh Pohan akan memberikan bantuan berupa sapi unggul kepada masyarakat untuk dipelihara dan ditenak. *Ketiga*. Kepala Dinas Kehutanan (saat itu di bawah pimpinan Sumantri) berjanji akan memberikan bantuan berupa bibit jati dan bibit-bibit lainnya demi reboisasi hutan yang gundul di Kecamatan Donggo, serta memprioritaskan pembangunan Masjid megah di Desa OO sebagai ibukota Kecamatan Donggo (Mustahid dan La Nora, 2017, 62-63).

Setelah “Kesepakatan Pandai” diterima oleh pihak pemerintah, kedua belah pihak sepakat untuk kembali tempat masing-masing. Pengunjuk rasa di bawah pimpinan kelima tokoh kembali ke Donggo dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh sekitar 40 kilometer. Sedangkan rombongan DPRD dan Muspida Pemkab tingkat II Bima, pulang membawa hasil “Kesepakatan Pandai” beriringan menggunakan mobil dinas di bawah pengawalan ABRI/Polri. Keesokan harinya *Dou Donggo* yang mengikuti *long march*, secara bersama-sama selalu mensosialisasikan kepada rakyat yang tidak sempat ikut dalam aksi hasil kesepakatan massa demonstran dengan pemerintah di Desa Pandai.

Pasca Peristiwa

Dou Donggo Menggelar Makka

Setelah melakukan aksi massa tanggal 22 Juni 1972, masyarakat Donggo tidak melakukan konsolidasi lanjutan dalam bentuk apapun. Akan tetapi empat hari setelah itu, rupanya ‘Kesepakatan Pandai’ tidak terlalu digubris oleh Bupati Bima. Justru Bupati Bima mengirim utusannya ke Donggo untuk menyampaikan sikapnya atas aksi massa dari Donggo. Mereka yang oleh Bupati Bima ke Donggo saat itu adalah Lettu (Inf) TNI AD Amir Hamzah, Komandan Bupetra (sekarang Koramil) Kodim 1608, bersama Muhammad Said, seorang Perwira Resort Bima dan didampingi oleh Aiptu Pol Muhtar Abbas,

Dansek Donggo (sekarang Kapolsek). Sampai di Donggo tepatnya di Pasanggarahan Desa O'O, utusan Bupati Bima menyampaikan jawaban bahwa Bupati kabupaten tingkat II Bima, menolak semua tuntutan masyarakat Donggo sebagaimana yang tertuang dalam hasil 'Kesepakatan Pandai'. Mereka juga menyampaikan sikap Bupati Bima bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan sebagai Bupati kepala daerah Kabupaten Tingkat II Bima seperti tuntutan aksi masyarakat Donggo.

Mendengar sikap dan keputusan Bupati Bima melalui utusannya di Pasanggarahan, ketiga orang tokoh Donggo (H. Kako Bungko, H. Marzuki Abdullah dan La Deo ompu So) yang hadir langsung naik darah. Mereka tentu tidak ingin berdiam diri menerima begitu saja kebijakan Bupati Bima apalagi dicap sebagai seorang pengecut di depan masyarakat Donggo. Ekspresi kemarahann mereka di atraksikan dengan Kuntau, bagi masyarakat Donggo menyebutnya dengan istilah *Makka*. H. Kako yang sudah lama dikenal sebagai seorang yang kebal dengan kekuatan supranatural mengeluarkan pedang (*Cila Lapi*) yang ia bawa dan melipat-lipatnya di depan utusan Bupati Bima. Pedang yang sudah dilipat-lipat oleh H. Kako Bungko diambil oleh La Deo Ompu So dan meluruskannya kembali dengan keadaan seperti semula. Pedang H. Kako yang sudah diluruskan oleh La Deo Ompu So diambil oleh H. Marzuki Abdullah, ia mengiris tangan kirinya hingga mengeluarkan darah segar. Namun, dengan ajian *Tapa Ra'a* (penghentian darahnya), H. Marzuki Abdullah meniup darah yang mengalir di tangannya. Dalam sekejap darahnya berhenti dan tangannya sembuh seketika tanpa meninggalkan bekas luka. Atraksi ketiga orang bisa terjadi karena atas kekuasaan Allah SWT.

Makka (sumpah atau semboyan) di atraksikan oleh tiga orang tokoh Donggo yaitu H. Kako Bungko, H. Marzuki Abdullah dan Syamsuddin (yang akrab dipanggil La Deo ompu So) dengan menggunakan senjata tajam di hadapan utusan Bupati Bima. *Makka* digelar sebagai ekspresi kemarahan sekaligus menunjukkan kejantanan mereka dalam

menantang segala bentuk kemunafikan dan penghianatan oleh rezim Suharmaji. Bentuk syair dalam semboyan saat menggelar *Makka* adalah sebagai berikut: "*Tas rumae ..., Ake ringamu sahe ranga tuntumbanta, mada ngawa tanggiri di dana ma tere. Tanggiri di dana ma tere, tahopo tanggiri na di dana ma piri*". Artinya; Wahai Allah SWT, engkau saksikan bahwa ini kerbau jantan bergunuk melintang yang tidak terpeleset di kemiringan tanah. Daripada terpeleset di kemiringan tanah, lebih baik terpeleset di tanah yang rata (Mustahid dan La Nora, 2017: 96-97).

Makna syair yang diucapkan pelaku dengan eksresi Kuntaunya menggambarkan sifat keberanian *Dou Donggo* sebagai seorang lelaki sejati yang pantang mundur di medan juang, dan siap menghadapi segala konsekuensi dalam membela kebenaran dan keadilan walau dibayar dengan darah dan nyawa. Ekspresi ketiga tokoh Donggo dengan kemampuan supranaturalnya mampu menyatukan gerakan mistik dengan gerakan sosial dan secara psikologis telah melahirkan militansi masyarakat Donggo dalam menegakkan keadilan. Usai menggelar *Makka*, tokoh-tokoh Donggo kembali menggelar rapat menindaklanjuti keputusan Bupati Bima. Rapat tanggal 25 Juni 1972 membuahkan hasil yang tertuang dalam "Petisi Sepuluh". Dalam Petisi ini berisi desakan atas Bupati Bima agar segera turun dari jabatannya, dan mereka mengancam Bupati Bima dengan menjadikan Kabupaten Bima sebagai perkuburan massal jika Bupati tidak mau turun dari jabatannya. Petisi sepuluh dikeluarkan sebagai respon balik atas jawaban Bupati terkait tuntutan masa Donggo yang tertuang dalam "Kesepakatan Pandai".

Tertangkapnya Tokoh Sentral dan Tindakan Represif Rezim

Dua hari pasca *Dou Donggo* Menggelar *Makka* dan Mengeluarkan "Petisi Sepuluh", Bupati Bima merespon 'tantangan' tokoh-tokoh lokal di Donggo secara represif. Pihak pemerintah di bawah perintah Letkol Soeharmadji mengirim ratusan anggota gabungan ABRI/Polri untuk menumpas gerakan sosial masyarakat Donggo yang

dinilainya mulai melakukan pemberontakan. Anggota Gabungan ABRI/Polri bergerak di bawah Komandan Kapten Inf. Zainuddin AG, Seorang Danki (Komandan Kompi) Senapan A Bima, Batalion Infanteri 742 Satya Wira Yudha. Selain itu, Bupati Bima meminta Gubernur NTB untuk memerintah Korem 162/WB NTB di Mataram, bahkan Gubernur NTB meminta bantuan juga dari Pangdam IX Udayana, Bali. Kehadiran pasukan gabungan dari Komandan Kompi Senapan A Bima, Batalion Infanteri 742 Satya Wira Yudha, Korem 162/WB NTB di Mataram, dan Pangdam IX Udayana, Bali di Bima bertugas menumpas massa demonstran dari Donggo. Demi kelancaran koordinasi, pasukan gabungan membentuk Posko TOSD (Team Operasi Sadar Donggo) yang bermarkas di kediaman Ahmad M. Saleh atau Ahmad Tabo, seorang Kepala Desa Bajo di Desa Bajo, Kecamatan Donggo. TOSD bertugas mengintai dan menumpas setiap pergerakan massa yang mulai mencuat di sekitar *Dana Donggo*.

Satu persatu tokoh tokoh lokal dari Donggo ditangkap oleh anggota TOSD, penangkapan pertama dilakukan terhadap Abas dkk Oya saat menjalankan misi pembebasan Usman Dete menuju Posko TOSD. Sekitar satu kilometer dari Desa Bajo, Abas Oya beserta rombongannya dikepung secara mendadak oleh TOSD yang sejak awal mengintai pergerakan masyarakat Donggo. Selama perjalanan menuju Desa Bajo, tangan Abas Oya dkk diborgol dan ditarik menggunakan tali. Sampai di Posko TOSD, Abas Oya disiksa secara barbarian, kakinya Abas Oya diikat dengan tali nilon, kukunya dicabut paksa, tubuhnya di injak-injak dengan sepatu laras, dan kepalanya dilempari pakai kursi dan meja, perlakuan sungguh diluar batas kemanusiaan.

Informasi penyiksaan TOSD atas Abas Oya dkk menyebar luas di kalangan *Dou Labo Dana Donggo*. Kondisi demikian, mendorong M. Ali Taamin mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan untuk menggalang kekuatan massa demi membebaskan Abas Oya dkk. Selesai rapat, Jamaluddin H. Yasin bersama M. Ali Taamin langsung memimpin masyarakat Donggo

mendatangi Pos keamanan TOSD di Bajo tanpa menunggu kehadiran yang lainnya termasuk Abdul Madjid Bakry dan H. Kako Bungko. Namun rencananya sudah terbaca oleh TOSD, Di Desa Bajo mereka diterima baik oleh Kapten Inf. Zainuddin AG dengan menggandeng tangan Jamaluddin H. Yasin dan M. Ali Taamin menuju Posko TOSD dan diserahkan kepada secara terpisah. Setelah diserahkan secara resmi, Keduanya bersama rombongan disambut dengan pukulan bertubi-tubi. Mereka dipreteli satu persatu sampai babak belur dengan cara diluar batas kemanusiaan, persenjataan tradisonalnya dilucuti, tangannya di borgol, badannya ditelanjangi, semua jari kuku tangnya di cabut, bahkan makan dan minum pun seala kadarnya. Bahkan anggota TOSD tidak mau menggubris disaat M. Ali Taamin meminta dilepaskan borgol yang ada di tangan dan kakinya karena ingin melaksanakan sholat Isya. Dengan kondisi tubuhnya yang sudah lemas, M. Ali Taamin memaksa dirinya melaksanakan sholat Isya mekipun badannya penuh darah segar dan duduk menghadap kiblat dengan niat sholat isya. Selesai sholat Isya, ia duduk menengadah sepanjang malam sambil menunggu tibanya waktu sholat subuh, tengah malam dirinya sempat melihat Jamaluddin H. yasin dan Obas Oya yang duduk dalam kondisi tidak berdaya tanpa pakaian (kecuali secuil celana dalamnya saja) di dalam kamar tahanan yang berseblahan dengan tempat sholatnya (Mustahid dan La Nora, 2017: 109-110).

Dengan Tertangkapnya Abas Oya, Jamaluddin H. Yasin dan M. Ali Taamin, Maka target selanjutnya yaitu mencari H. Kako dan Abdul Madjid Bakry. Berhari-hari usaha TOSD menyisir Dana Donggo tetapi belum membuahkan hasil, akibat merasa tidak puas, anggota TOSD melanjutkan operasi penangkapan terhadap *Dou Donggo*. ABRI dalam suasana tengah malam melakukan operasi penyisiran menangkap masyarakat yang ada di Dusun Ndanondere dan Desa Dori Dunga yang tengah tidur lelap di rumahnya. Sebanyak 60 orang masyarakat yang tidak berdosa termasuk yang tidak terlibat dalam aksi massa 22 Juni 1972 diseret dan disiksa, sampai ke Desa Bajo mereka di tahan di SDN Bajo sebagai jaminan sebelum target operasi

tertangkapnya H. Kako dan Abdul Madjid Bakry. Bahkan setelah kelima tokoh tertangkap semua, mereka dilepas bersyarat dan wajib lapor hingga situasi benar-benar kondusif.

Kapten Inf. Zainuddin AG ingin mengakhiri perburuan dengan menulis surat yang ditujukan kepada H. kako dan Abdul Madjid Bakry untuk hadir di Posko TOSD. Surat yang dibuatnya ditandatangani oleh ketiga tokoh Donggo. Sampai ditangan H. Kako, surat itu sempat diabaikannya. Namun, setelah adanya bujukan dari sang istri, akhirnya H. Kako mau menyerahkan diri tanggal 1 Juli 1972. Ia sempat berpesan kepada istrinya *“saya sekarang akan menyerahkan diri, kalau saya disiksa di Pasenggarahan, maka disitulah saya dikuburkan. Kalaupun saya tidak kembali kampung, Inshaa Allah kita akan bertemu di Akhirat kelak”* (Mustahid dan La Nora, 2017: 176). Kepada TOSD, H. Kako diserahkan oleh istri dan pihak keluarganya dengan mengutus Hamrun Ranto Ama Siri dan Iparnya sendiri (Ismail Gambo Ama Gombu). Sesampai di Pasenggarahan, H. Kako bertemu dengan Abdul Madjid Bakry yang menyerahkan diri lebih awal.

Keduanya diserahkan kepada anggota TOSD di Pasenggaraha dan usai penyerahan secara resmi keduanya dinaikan ke atas Truk ABRI secara terpisah. Begitu menginjak kakinya di atas Truk ABRI, Abdul Madjid Bakry langsung dipreteli oleh TOSD. Ia diperlakukannya melebihi batas kewajaran bahkan binatang pun tidak layak menerima penyiksaan sadis seperti yang dilakukan oleh TOSD. Abdul Madjid Bakry disiksa dalam Truk ABRI sepanjang perjalanan menuju Desa Bajo bahkan penyiksaan atas dirinya berlanjut setelah sampai di Posko TOSD yang berpusat di Desa Bajo. Perlakuan represif yang dipertontonkan oleh aparat keamanan yang bergabung dalam TOSD, tidak seharusnya terjadi seandainya pemerintah Kabupaten Bima mendengarkan aspirasi rakyat dan mau melayani rakyat dengan tangan terbuka. Soeharmadji sebagai perpanjangan rezim Orde Baru di daerah Bima rupanya lebih mementingkan otot ketimbang otak, bertindak represifitas bukan

mengedepankan rasionalitas, bergaya otoriter dan anti kritik.

Kelima tokoh dari *Dana Donggo* yang sudah ditangkap dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Raba-Bima tanggal 14 Mei 1973. Mereka di jatuhi hukuman yang bervariasi, H. Kako di tahan 2 tahun, Abdul Madjid Barky 2,5 tahun, M. Ali Taamin 3 tahun, sedangkan Jamaluddin H. Yasin dan H. Abas Oya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Tertangkapnya lima tokoh sentral yang menggerakkan *Dou Donggo* dalam “Peristiwa Donggo 1972” menandai berakhirnya gerakan sosial di Bima Era Orde Baru.

PENUTUP

Gejolak sosial yang terjadi di Bima dilatari oleh sikap dan tindakan represifitas rezim Orde Baru. Bupati Bima di bawah pimpinan Letkol Soeharmadji berusaha mempertahankan kekuasaan dengan cara kuningsasi Partai Golkar di daerah kekuasaannya. Dengan dukungan penuh dari kalangan militer, Ia menggunakan cara-cara represif demi mengokohkan tumbuhnya pohon beringin (Partai Golkar) di Derah Bima. Salah satu cara militer mengeksekusi kebijakan pemerintah yaitu dengan melakukan Operasi Koter (Komando Teritorial) tahun 1971 di Bima. Namun usaha kuningsasi tidak berjalan mulus, di Kecamatan Donggo mendapat penolakan dari kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh lokal yang sejak awal sudah berafiliasi secara politik dengan Partai Persatuan dan Pembangunan dan Partai Sarikat Muslimin Indonesia (Parmusi). Hal ini terbukti saat pemilu tahun 1971 yang berpusat di Desa Bajo, Golkar mengalami kekalahan telak dari partai-partai Islam yang tidak didanai oleh pemerintah dan tanpa dukungan dari kalangan militer. Kekalahan Golkar semakin mengundang amarah dari kalangan militer, sehingga beberapa tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh dari Dana Donggo mendapat perlakuan represif dari rezim Soeharmadji melalui Tripika, Camat Donggo, Danbuteptra, dan Dansek Donggo.

Represifitas rezim Soehardjati mendapat perlawanan dari masyarakat Donggo yang dipelopori oleh elite-elite yang berpengaruh di Dana Donggo. Bersatunya Tokoh-tokoh lokal dari Donggo telah melahirkan semangat perlawanan massa dalam menggugat Bupati Bima yang bertindak otoriter dan militeristik. Atas nama solidaritas etnik, Massa bersatu dan bergerak dalam Aksi Massa yang berlangsung tanggal 22 Juni 1972. Aksi massa yang dimotori oleh *Dou Donggo* sebagai ekspresi kekecewaan massa sekaligus sebagai bentuk kritikan atas ketimpangan pembangunan dan tindakan represifitas militer. Peristiwa ini dikenal dengan “Peristiwa Donggo 1972”, satu-satunya bentuk perlawanan atas rezim Orde Baru di *Dana Mbojo*.

Rupanya gejolak sosial yang sempat menggegerkan Bumi Gora tahun 1972, berpotensi mengancam elektabilitas dan kekuasaan rezim Soehardjati. Karena itu, ia menolak semua tuntutan massa yang termuat dalam “Kesepakatan Pandai”. Beberapa tokoh-tokoh lokal dari Donggo sempat menggelar *Makka* sebagai ekspresi tantangan terhadap keputusan Bupati Bima yang dinilai bertindak diskriminatif atas *Dou Donggo*. Soehardjati melalui tangan-tangan militer yang bergabung dalam TOSD (Tiem Operasi Sadar Donggo), malah bertindak membabi buta dengan menangkap dan menyiksa elite-elite yang menggerakkan massa termasuk masyarakat yang tidak berdosa sekalipun. Tertangkapnya lima tokoh sentral menandai berakhirnya sebuah gejolak sosial di Bima Era Orde Baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini. Rasa terima kasih khususnya saya sampaikan kepada Balai Litbang Agama Makassar, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan dan Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi kegiatan Seminar Internasional “*Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions*”

dari sejak proses seleksi paper sampai terselenggaranya kegiatan di Hotel Aryaduta tanggal 27-29 Agustus 2019. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada *review* dan *editor* Jurnal Al-Qalam yang telah menerbitkan tulisan ini. Semoga Allah SWT meridhoi segala aktivitas kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, H. 1995. *Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Orde in Java*. Richmond Surrey: Curzon Press.
- Crouch, Harold, 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fatah, Eep Saefullah. 1998. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin (ed). 2010. *Mengenal Tuan Guru Imam Haji Abdurrahman Idris*. Bima: Pustaka Darul Hikmah.
- Hasan, Muhammad Kemal. 1987. *Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim*. Jakarta: LSI.
- Jenkins, David. 1984. *Suharto and His Generals. Indonesians Military Politics 1975-1983*. Ithaca. Cornell U.P.
- Jurdi, Syarifuddin. 2007. *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karim, Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- La Nora, Ghazaly Ama. 2008. *Mutiara Donggo: Biografi Perjuangan Tuang Guru Abdul Majid Bakri*. Jakarta. NCI Press.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti.
- Mustahid. 2013. *Peristiwa Donggo di Pentas Nasional Tahun 1972: Mengungkap Peristiwa Penangkapan, Penyiksaan, dan Hukuman Semasa Orde Baru*. Mataram: Lombok Post.

- Mustahid dan La Nora, Ghazaly Ama. 2017. *Peristiwa Donggo 1972: Sketsa Pergolakan Politik Bima Era Orde Baru*. Mataram: PT. Suara Niaga Nusantara (Lombok Post Group).
- McDonald, Hamish. 1980. *Suharto's Indonesia*. Blackburn, Victoria: Fontana.
- Nordlinger, Eric. 1977. *Soldiers in Nufti: Military Coups and Gouverments*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentise-Hall.
- Rangga R, Ridha. 2011. *Gerakan Sosial Masyarakat Donggo Tahun 1972: Kisah Elit-Elit Terkalahkan*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Shambazy, Budiarto. 1990. 'Sipil dan Militer: Siapa Harus Lebih Dominan' dalam *Menuju Masyarakat Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI*. Jakarta: Gramedia.

